



Judul : Menkumham: RUU Omnibus Law dan pemindahan ibu kota jadi prioritas
Tanggal : Kamis, 05 Desember 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 12

Menkumham: RUU *Omnibus Law* dan Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas

[JAKARTA] Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait *omnibus law* dan pemindahan ibukota menjadi prioritas yang harus segera disahkan.

"Yang sangat prioritas adalah *omnibus law*. Pemindahan ibu kota negara dan RUU yang *carry over* dari periode lalu," kata Yasonna

Dia menjelaskan RUU terkait *omnibus law* adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Menurut dia, RUU tentang Ibukota Negara harus dibahas karena pemindahan ibu kota negara merupakan program yang harus segera diselesaikan dasar hukumnya.

"Nanti DPR juga mengajukan yang lain, nanti kita lihat," ujarnya.

Selain itu menurut dia, ada beberapa RUU yang menjadi prioritas pemerintah yang harus segera diselesaikan yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan, dan RUU Bea Materai yang ketiganya merupakan *carry over* periode 2014-2019.

Yasonna mengatakan, untuk RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak masuk dalam prioritas yang diusulkan pemerintah karena masih ada yang harus dibahas ulang.

"(RUU P-KS) sementara ini tidak menjadi prioritas karena masih ada yang harus dibahas ulang," katanya.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan akan menuntaskan 135

“
Yang sangat prioritas adalah *omnibus law*, Pemindahan ibu kota negara dan RUU yang *carry over* dari periode lalu.”

RUU dalam lima tahun ke depan. Target itu telah dimasukkan dalam Prolegnas 2019-2024.

Ketua Baleg DPR Supratman mengatakan, Baleg DPR tidak ingin mengulang kesalahan periode lalu. Periode lalu DPR

hanya mengesahkan 90 RUU dari 189 yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

"Penyelesaian Prolegnas yang demikian membuat penilaian legislasi DPR sangat rendah, ini harus kita akui. Kinerja legislasi tersebut bukan semata-mata kesalahan DPR, ini menjadi tanggung jawab bersama DPR, pemerintah, DPD dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukan," kata Supratman dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

Pertimbangan

Politisi Gerindra itu mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas 2020, ada beberapa hal dipertimbangkan. *Pertama*, RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap

pembicaraan tingkat satu terutama *carry over* periode sebelumnya.

Kedua, RUU yang sudah siap naskah akademik dan drafnya. *Ketiga*, RUU yang masuk kriteria dan memenuhi urgensi masuk Prolegnas 2020. Supratman menjelaskan, Baleg menerima usulan 451 RUU masuk dalam Prolegnas jangka menengah prioritas 2020-2024. Usulan tersebut berasal dari fraksi, komisi, pemerintah, dan organisasi sosial masyarakat.

"Kami perlu sampaikan bahwa dalam penyusunan Prolegnas tahun 2020-2024 Badan telah menerima usulan sebanyak 451 rancangan undang-undang," kata

Dia menjelaskan, Baleg DPR telah menentukan target penyelesaian RUU menjadi UU dalam

15 RUU Prioritas Tahun 2020 yang Menjadi Usulan Pemerintah

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. RUU tentang Pemasyarakatan
5. RUU tentang Bea Materai
6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
7. RUU tentang Perubahan Atas UU 35/2009 tentang Narkotika
8. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
9. RUU tentang Perubahan atas UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
11. RUU tentang Ibukota Negara
12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
14. RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
15. RUU tentang Perkeroperasian.

lima tahun ke depan. Dia menyebut setiap komisi ditargetkan mengesahkan 2 RUU, Baleg DPR dua RUU, dan Panitia Khusus ada 3 RUU

menjadi UU. "Dari gambaran tersebut dapat dikatakan dalam 5 tahun dapat diselesaikan sebanyak 135 RUU," ujarnya. [H-14]